KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 29 Agustus 2018

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 6)	Rabu, 29 Agustus 2018	Pinjaman AIIB Ditentukan September	Untuk infrastruktur perkotaan dan wisata Mandalika
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 6)	Rabu, 29 Agustus 2018	2 KEK PAriwisata Beroperasi 2019	KEK Pariwisata Tanjung Kelayang dan Morotai
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 6)	Rabu, 29 Agustus 2018	Hadez Siap Garap Proyek Rp1 Triliun	Hadez siap garap proyek pemerintah
4	Koran Tempo (Halaman, 21)	Rabu, 29 Agustus 2018	ACST Kejar Kontrak Baru Proyek Jalan Tol	Konstruksi pelabuhan dan pembangkit listrik juga diincar
5	Investor Daily (Halaman, 22)	Rabu, 29 Agustus 2018	2018, Perintah Optimistis Salurkan Rp 6,5 Triliun	Untuk KPR FLPP program sejuta rumah
6	Investor Daily (Halaman, 22)	Rabu, 29 Agustus 2018	Kemenhub Bangun Rumah Tahan Gempa	Rumah bagi korban gempa di Lombok

Judul	**Pinjaman AIIB Ditentukan September**	Tanggal	Rabu, 29 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 6)		
Resume	Untuk infrastruktur perkotaan dan wisata Mandalika		

▸ PENGEMBANGAN MANDALIKA

Pinjaman AIIB Ditentukan September

JAKARTA — Kucuran pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank senilai US$260 juta atau sekitar Rp3,7 triliun untuk pengembangan infrastruktur perkotaan dan wisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat ditargetkan dapat diketahui pada September 2018.

Hadijah Alaydrus & Irene Agustine
redaksi@bisnis.com

Head of Communication and Development AIIB Laurel Ostfield mengatakan bahwa usulan dari Pemerintah Indonesia tersebut dalam proses evaluasi oleh direksi AIIB dan rencananya diputuskan pada bulan depan.

Pemerintah Indonesia, katanya, mengusulkan pinjaman untuk pengembangan kawasan Mandalika senilai US$260 juta dari total kebutuhan US$300 juta.

Menurutnya, keputusan pemberian pinjaman dari AIIB bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai tersebut bila disetujui direksi.

Rencananya, proyek tersebut akan mencakup pembangunan dasar untuk mendukung pengembangan perkotaan dan pariwisata Mandalika seperti akses jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan pengembangan kawasan.

Walau berfokus di Mandalika, proyek tersebut diarahkan agar bermanfaat bagi komunitas Lombok dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di pulau tersebut sesuai dengan visi AIIB.

"Sampai dengan saat ini belum ada keputusan, mudah-mudahan bulan depan. Jika disetujui ini akan menjadi proyek *stand alone* [pinjaman sendiri tanpa *co-financing*] kami yang pertama di Indonesia," kata Laurel dalam *roundtable discussion*, Selasa (28/8).

Sebelumnya, AIIB telah menyetujui pemberian pinjaman untuk empat proyek infrastruktur di Indonesia dengan total pendanaan mencapai US$691,50 juta atau sekitar Rp10,02 triliun (asumsi kurs US$1 = Rp14.500). Keempat proyek tersebut didanai dengan skema *co-financing* dengan bank multilateral lain, World Bank.

Keempat proyek yang didanai tersebut yakni proyek perbaikan operasional dan keselamatan bendungan fase II senilai US$125 juta dari total kebutuhan US$300 juta, dana pengembangan infrastruktur regional senilai US$100 juta dari kebutuhan US$406 juta.

Selain itu, proyek nasional perbaikan wilayah kumuh senilai US$216,50 juta dari kebutuhan US$1,70 miliar dan modernisasi irigasi strategis dan proyek rehabilitasi mendesak pertanian sejumlah US$250 juta dari total kebutuhan US$578 juta.

Saat ini, Ostfield mengemukakan bahwa tiga proyek yang disebut di awal itu tengah dalam proses administrasi pinjaman, sedangkan satu proyek terakhir yakni modernisasi irigasi strategis dan proyek rehabilitasi mendesak pertanian baru saja menyelesaikan tahapan persetujuan pada akhir Juni.

BELUM BERUBAH

Dia mengungkapkan, belum ada perubahan usulan atau pembicaraan tambahan antara Pemerintah Indonesia dan AIIB setelah wilayah Lombok diguncang gempa beberapa kali dalam sebulan terakhir.

Ostfield juga mengatakan, belum ada pembicaraan dari pemerintah pusat, misalnya, untuk menambah usulan pinjaman mengingat banyaknya infrastruktur di Lombok yang harus direhabilitasi pascagempa.

"Dengan adanya gempa yang terjadi di Lombok, belum ada perubahan usulan dan putusan tertentu apakah pinjamannya akan diperbesar atau malah di-*pending* dan belum ada pembicaraan juga seperti itu," ujarnya.

AIIB merupakan lembaga multilateral keuangan yang berbasis di China dan baru didirikan pada Januari 2016. Lembaga ini fokus memberi pinjaman untuk infrastruktur yang berkelanjutan dan sektor produktif lainnya di sejumlah negara Asia dan di luar Asia.

Selain fokus pada pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, ujar Ostfield, AIIB fokus untuk mencari solusi pembiayaan yang inovatif dengan mengombinasikan modal dari swasta dengan bank pembangunan lain, pemerintah, dan sektor swasta.

Modal swasta bisa menjadi bagia penting dari solusi pembiayaan inve tasi infrastruktur di Benua Asia selan beberapa dekade mendatang.

"AIIB berharap dapat terus beker sama dengan Pemerintah Indonesia untu mengakselerasi dan memperbesar ska kerja sama pemerintah dan badan usah [KPBU] melalui proyek-proyek yang a saat ini," ujarnya.

▸ **Indonesia mengusulkan pinjaman untuk pengembangan kawasan Mandalika sejumlah US$260 juta.**

▸ **AIIB merupakan lembaga multilateral keuangan yang berbasis di China dan didirikan pada Januari 2016.**

▸ PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Ketersediaan Air di NTB Kian Terjamin

JAKARTA — Nusa Tenggara Barat akan mendapat sokongan infrastruktur irigasi yang signifikan sejalan dengan pembangunan lima bendungan di provinsi tersebut.

Walhasil, lebih dari separuh sawah di NTB yang merupakan sawah irigasi akan mendapat jaminan pasokan air dari debit bendungan.

Bendungan kelima yang akan dibangun tahun ini di NTB adalah Bendungan Meninting.

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat telah membuka lelang proyek Bendungan Meninting dengan estimasi nilai proyek senilai Rp1,40 triliun.

Berdasarkan data layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), proyek tersebut dibagi menjadi dua paket. Paket pertama dilelang dengan harga perkiraan sendiri senilai Rp923,25 miliar, sedangkan paket kedua Rp496,29 miliar.

Tahap prakualifikasi dibuka pada 28 Agustus 2018 sampai dengan 6 September 2018. Penetapan pemenang dijadwalkan pada 16 November 2018 dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pada 3 Desember 2018. Pembangunan Bendungan Meninting ditargetkan bisa rampung dalam 3 tahun.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa Bendungan Meninting dibangun dengan beragam fungsi umum seperti sumber penampungan air, irigasi lahan pertanian, dan pembangkit listrik.

Menurutnya, lima bendungan yang dibangun di NTB memiliki beragam fungsi. "Hanya yang ditamakan [untuk] irigasi," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (28/8).

Bendungan Meninting dirancang dengan volume daya tampung 9,90 juta meter kubik. Air dari bendungan ini bisa menjadi sumber kebutuhan irigasi lahan seluas 1.559 hektare.

Selain Bendungan Meninting, pemerintah juga membangun empat bendungan lain di NTB, yakni Bendungan Beringin Sila, Bintang Bano, Mila, dan Tanju.

Bendungan Mila dan Bintang Bano sudah memulai tahap pembangunan dan diharapkan bisa selesai akhir tahun ini.

Dua bendungan itu bisa mengairi 10.634 hektare, sedangkan Bendungan Tanju diproyeksi bisa berfungi pada Februari 2019.

Sementara itu, pembangunan Bendungan Beringin Sila diperkirakan bisa dimulai pada kuartal keempat tahun ini atau selepas penandatanganan kontrak yang dijadwalkan pada Oktober 2018. Saat ini, proses lelang baru sudah memasuki tahap penawaran dari kontraktor yang lolos prakualifikasi.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, NTB yang dijuluki Provinsi Seribu Masjid merupakan lumbung padi yang penting bagi Bali dan wilayah Nusa Tenggara.

Data Statistik Pertanian menunjukkan bahwa pada 2016 luas areal sawah mencapai 276.230 hektare. Dari jumlah tersebut, areal seluas 211.740 hektare atau 77% merupakan sawah irigasi.

Di kawasan Bali-Nusra, NTB juga menjadi penghasil padi terbesar dengan produksi mencapai 2,34 juta ton pada 2017, meningkat 11,91% dibandingkan dengan 2016. Secara rerata, produktivitas sawah di NTB mampu menghasilkan 49,21 kuintal padi per hektare. *(Rivki Maulana)*

Judul	**2 KEK Pariwisata Beroperasi 2019**	Tanggal	Rabu, 29 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 6)		
Resume	KEK Pariwisata Tanjung Kelayang dan Morotai		

PEMBANGUNAN DAERAH

2 KEK Pariwisata Beroperasi 2019

JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata Tanjung Kelayang dan Morotai ditargetkan dapat beroperasi pada 2019.

Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Wahyu Utomo mengatakan, ada 4 KEK yang didesain untuk pariwisata yakni Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, dan Tanjung Kelayang.

Dari empat KEK pariwisata tersebut, saat ini yang sudah beroperasi a.l. Mandalika dan Tanjung Lesung. Adapun, untuk Morotai dan Tanjung Kelayang masih dalam tahap pembangunan.

"Untuk Morotai diharapkan bisa beroperasi pada akhir tahun ini, sedangkan Tanjung Kelayang beroperasi pada akhir tahun depan. Meski beroperasi, pembangunan tetap dilakukan," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (28/8) malam.

Dia menjelaskan, pengoperasian KEK tak harus menunggu seluruh pembangunan selesai. KEK harus siap beroperasi paling lambat 3 tahun sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam 3 tahun belum siap beroperasi maka dilakukan evaluasi dan perpanjangan KEK.

"Seperti Mandalika, meski sudah beroperasi tetap kami buka investasi pembangunan. Morotai nanti dilihat kami evaluasi dulu kalau siap beroperasi ya mudaha-mudahan akhir tahun ini," katanya.

Selain 4 wilayah yang telah ditetapkan sebagai KEK, terdapat 25 usulan wilayah untuk ditetapkan sebagai KEK pariwisata. Namun, 25 wilayah tersebut masih dalam pembahasan di tingkat daerah.

Dalam RPJMN, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki 25 KEK hingga 2019. Saat ini terdapat total 12 KEK, dan empat di antaranya untuk pariwisata.

Ketua Tim Percepatan Kawasan Pariwisata Kemenpar Azwir Malaon menuturkan, dari 25 usulan KEK pariwisata, ada tiga wilayah yang akan disidangkan oleh Dewan Nasional untuk ditetapkan sebagai KEK.

Ketiga wilayah itu yakni Tanjung Gunung di Bangka, Sungai Liat di Bangka, dan Singosari di Malang.

"Ketiga wilayah ini akan disidangkan pada September. Setelah disidangkan, lalu ditetapkan dan dikeluarkan aturan PP baru dibangun. Saat ini tiga usulan ini lagi dirapatkan oleh tim pelaksana dan verifikasi dokumen," ucapnya.

Selain tiga usulan KEK yang akan disidangkan, terdapat juga 1 wilayah yang juga disetujui untuk menjadi KEK yakni Mentawai. Lalu untuk KEK di Sukabumi, yakni Cikidang dan Pengandaran, masih dalam tahap persiapan di tingkat Pemerintah Provinsi untuk diajukan dan ditetapkan sebagai KEK.

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo meminta agar pemerintah tak mengejar penetapan sejumlah wilayah untuk dijadikan KEK. Pasalnya, masih banyak KEK yang harus diselesaikan pembangunannya meski beberapa sudah ditetapkan beroperasi.

Dia mengungkapkan, dalam pembangunan KEK khususnya untuk sektor pariwisata, masih terdapat berbagai permasalahan yakni banyaknya hambatan pada proses akuisisi dan perubahan kepemilikan lahan. *(Yanita Petriella)*

Judul	**Hadez Siap Garap Proyek Rp1 Triliun**	Tanggal	Rabu, 29 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 6)		
Resume	Hadez siap garap proyek pemerintah		

Hadez Siap Garap Proyek Rp1 Triliun

JAKARTA — Berpengalaman cukup lama sebagai kontraktor proyek pemerintah, mendorong Hadez Group menjajal jadi pengembang. Tak tanggung-tanggung, perusahaan itu menyiapkan hunian dengan investasi Rp1 triliun.

Direktur PT Hadez Graha Karya Ahmad Saepulloh mengatakan perusahaan itu awalnya menjadi kontraktor menggarap proyek pemerintah dengan nama PT Dania Pratama, seperti pembangunan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Sumatra Barat. Kini, perusahaan itu terjun sebagai pengembang dengan *brand* Hadez Group.

"Ada beberapa kerumitan seperti tender-tender yang merugikan ketika menjadi kontraktor proyek pemerintah yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk menjadi pengembang mandiri," katanya Selasa (28/8).

Ahmad menjelaskan dalam proyek perdananya Hadez Sentosa Residence di Jati Asih Bekasi, perusahaan akan mengembangkan lahan seluas 16 hektare untuk hunian rumah tapak yang dilengkapi dengan ritel berkonsep gaya hidup dan danau buatan dengan investasi Rp1 triliun. Perusahaan akan menggunakan dana internal sekitar Rp400 miliar untuk penguasaan lahan, dan sisanya untuk pembangunan ritel dan konstruksi hunian.

Sebagai proyek perdana, Hadez mengincar potensi kawasan Timur Jakarta semakin berkembang pesat seiring dibangunnya berbagai infrastruktur secara masif di kawasan tersebut. Sebut saja kereta api cepat Jakarta-Bekasi-Cikarang-Bandung, *light rail transport* (LRT) Cawang-Bekasi Timur-Cikarang dan *automated people mover* (monorail) dan yang terakhir, Jakarta Cikampek *elevated highway*.

Dia mengatakan sebagai pengembang baru, mungkin banyak konsumen yang masih meragukannya. Akan tetapi, kata dia, pihaknya sudah mengantungi perizinan di status lahannya. Bahkan, pada akhir tahun ini show unit akan dibangun. "September ini lahan sudah dirapikan. Selanjutnya kami mulai *groundbreaking* pada Oktober," imbuhnya.

Menurut rencana, pengembang akan membangun 1.000 unit rumah yang terbagi dalam 5 klaster. Pada tahap pertama akan dibangun 120 unit yang penjualannya terbagi dalam beberapa tahap, mulai dari harga Rp 400 juta-an per unit.

Dengan demikian, 60 unit akan diluncurkan lebih dahulu, dan saat ini berdasar nomor urut pesanan (NUP) sudah mencapai 30 konsumen. Sementara untuk ritel akan dibangun di atas 8.000 m^2.

Ahmad Saepulloh mengatakan sebagai pengembang baru, pihaknya telah mengantongi cadangan lahan seluas 200 ha untuk berbagai ekspansi di Jabodetabek. Fokus utama perusahaan, kata dia, adalah pembangunan rumah-rumah di segmen menengah dan bawah.

Setelah menjalankan proyek di Jati asih, Bekasi, maka selanjutnya akan ada proyek di Cikarang seluas 30 ha yang menyasar antara rumah subsidi dan hunian komersial. *(Anitana W. Puspa)*

Judul	**ACST Kejar Kontrak Baru Proyek Jalan Tol**	Tanggal	Rabu, 29 Agustus 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 21)		
Resume	Konstruksi pelabuhan dan pembangkit listrik juga diincar		

ACST Kejar Kontrak Baru Proyek Jalan Tol

ANDIKA FOTOS/EKO KURNIAWAN

Foto aerial proyek konstruksi jalan tol layang Jakarta-Cikampek (Japek) II di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 27 Juli lalu.

Konstruksi pelabuhan dan pembangkit listrik juga diincar.

Aditya Budiman
budiman@tempo.co.id

JAKARTA — PT Acset Indonusa Tbk, perusahaan konstruksi spesialis fondasi dengan kode saham ACST, menargetkan ikut menggarap dua proyek jalan tol untuk mengejar target kontrak baru senilai Rp 10 triliun tahun ini. Kedua proyek tersebut meliputi pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Selatan dan jalan tol Serpong-Balaraja. "Tol Japek (Jakarta-Cikampek) itu *must-to-have project*," kata Presiden Direktur Acset Indonusa, Jeffrey Chandrawijaya, kemarin.

Jeffrey mengatakan proyek infrastruktur, terutama pembangunan jalan tol, sangat strategis lantaran punya dampak terusan (*multiplier effect*) yang besar. "Pembangunan jalan tol nantinya akan diikuti pengembangan kawasan industri baru," kata dia.

Dia mencontohkan proyek jalan tol Jakarta-Cikampek Selatan yang bakal mendorong perkembangan kawasan industri di daerah Karawang, Jawa Barat. Pada sisi lain, jalan tol ini juga diyakini menjadi solusi untuk mengurai kepadatan arus di ruas tol Jakarta-Cikampek bagian utara.

Saat itu, proyek tol Jakarta-Cikampek Selatan tengah memasuki tahap prakualifikasi. Adapun proyek tol Serpong-Balaraja baru dalam proses persiapan tender. Jeffrey optimistis pelaksana kedua proyek tersebut akan diumumkan tahun ini. "Karena klien menargetkan konstruksi paling lambat awal tahun depan," ujarnya.

Acset merupakan bagian dari Astra Group lewat penguasaan saham PT Karya Supra Perkasa, anak usaha United Tractors. Saat ini perseroan tengah berfokus mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti jalan tol layang Jakarta-Cikampek II; tol Jakarta Outer Ring Road II ruas Kunciran-Serpong; dan proyek kereta ringan atau *light rail transit* ruas Cawang-Dukuh Atas.

Sepanjang semester I lalu, perusahaan mencetak pendapatan Rp 1,66 triliun, naik 63 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1,02 triliun. Laba bersih pada paruh pertama tahun ini pun meningkat menjadi Rp 73 miliar dari sebelumnya hanya Rp 64 miliar. Kendati begitu, data menunjukkan kontrak baru yang berhasil didapatkan perseroan baru mencapai Rp 313 miliar dari target Rp 10 triliun.

Menurut Jeffrey, selain mengincar proyek jalan tol, Acset tertarik menggarap proyek infrastruktur pelabuhan dan proyek pembangkit listrik. Khusus untuk pelabuhan, perusahaan telah mengawalinya dengan mendapatkan proyek pekerjaan di Pelabuhan Patimban senilai Rp 173 miliar. "Kami tidak fokus ke tol saja, *power plant* juga ada yang diincar," kata Jeffrey. Namun ia enggan menyebutkan proyek pembangkit mana yang menjadi incarannya.

Kepala Riset Narada Asset Management, Kiswoyo Adi Joe, menilai langkah Acset Indonusa mengincar proyek jalan tol sangat tepat. Sebab, kata dia, jalan tol merupakan salah satu proyek infrastruktur yang sedang dikejar penyelesaiannya hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Sudah banyak proyek yang diselesaikan pemerintah di sektor jalan tol," kata Kiswoyo.

Selain itu, Kiswoyo menilai, peluang penyelesaian proyek jalan tol lebih besar dibanding proyek infrastruktur lainnya. "Proyek yang dibangun terus dikebut dan kecil kemungkinan bakal mangkrak," ujarnya. ●

BELUM CAPAI TARGET

Memasuki semester II 2018, kontrak baru yang dikantongi PT Acset Indonusa Tbk baru mencapai Rp 313 miliar, jauh dari target perseroan sebesar Rp 10 triliun. Meski begitu, Presiden Direktur Acset Indonusa Jeffrey Chandrawijaya ogah terbebani target. Bagi dia, hal terpenting dalam mengejar kontrak baru konstruksi ialah proyek yang digarap aman bagi perusahaan. Berikut ini data kinerja ACST:.

■ **Proyek yang diperoleh pada semester I 2018:**

- Fly Ash Silo
- Graha Pertamina
- Tanjung Jati B Expansion Silo (Jawa 4)
- Pelabuhan Patimban
- Gedung Balai Kesehatan Penerbangan I
- Pelabuhan Terminal Peti Kemas

TEMPO/TONY HARTAWAN

■ **Kinerja Keuangan (Rp miliar)**

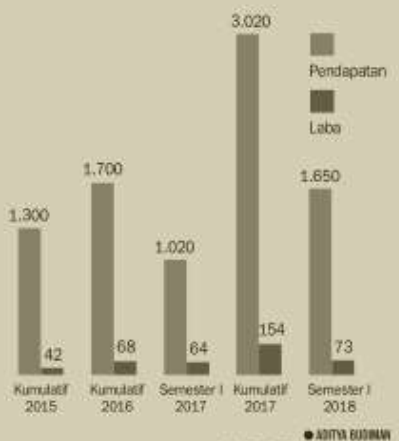

● ADITYA BUDIMAN
SUMBER: BURSA EFEK INDONESIA

Judul	**2018, Perintah Optimistis Salurkan Rp 6,5 Triliun**	Tanggal	Rabu, 29 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 22)		
Resume	Untuk KPR FLPP program sejuta rumah		

KPR FLPP PROGRAM SEJUTA RUMAH

2018, Pemerintah Optimistis Salurkan Rp 6,5 T

Oleh **Imam Mudzakir** dan **Edo Rusyanto**

Jakarta - Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis menyalurkan seluruh anggaran kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2018 sebesar Rp 6,5 triliun. Anggaran tersebut diharapkan mampu membiayai 70 ribuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Demikian rangkuman pendapat Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Budi Hartono, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman 'Eman' Soemawinata, dan Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Danil Djumadi. Mereka dihubungi *Investor Daily*, secara terpisah di Jakarta, baru-baru ini.

"Kami optimistis dapat menyalurkan seluruh anggaran KPR FLPP 2018 sebesar Rp 6,5 triliun. Salah satunya dengan menggandeng BTN sebagai bank pelaksana," tutur Budi Hartono.

Optimisme itu relevan bila merujuk hasil survei Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa pencairan FLPP pada triwulan II-2018 sebesar Rp 968 miliar atau secara tahunan melonjak sebesar 102,11% (*year on year*/yoy), lebih tinggi dibandingkan -38,81% (yoy) pada triwulan sebelumnya dan 49,54% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nasional, tulis BI, *share* penyaluran FLPP terhadap penyaluran KPR pada triwulan II-2018 sebesar 4,3%.

Budi Hartono menjelaskan, penyaluran KPR FLPP sejak 2010 sampai dengan 9 Agustus 2018 mencapai Rp 32,40 triliun atau setara untuk 532.713 rumah. Adapun penerima FLPP tahun 2018 baru sekitar sebanyak 12.885 unit rumah senilai Rp 1,5 triliun pada awal Agustus 2018.

KPR FLPP merupakan salah satu dari beberapa subsidi pemerintah bagi MBR. Subsidi lainnya adalah subsidi selisih bunga (SSB), subsidi bantuan uang muka (SBUM), hingga pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah tapak sederhana dan rusunami.

Kesemua subsidi itu bagian dari upaya pemerintah memperkuat sisi permintaan atau konsumen dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah yang digulirkan pemerintah.

Menurut Budi Hartono, mulai 20 Agustus 2018, komposisi pembiayaan pemerintah diubah dari semula 90% menjadi 75%. Sisanya, dipikul oleh lembaga pembiayaan lain seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) maupun perbankan. "Pengubahan komposisi ini juga memungkin jumlah rumah yang dibiaya menjadi lebih besar dari semula 40 ribuan unit menjadi 70 ribuan unit pada 2018," papar dia.

Pengembang Optimistis

Sementara itu, Danil Djumadi mengatakan, sebagai pengembang rumah MBR pihaknya optimistis pengembang bisa membangun rumah lebih banyak lagi. Apalagi, perbankan yang menyalurkan KPR FLPP lebih banyak sehingga peluang lebih besar. "Tentu sebagai pengembang optimistis dengan banyaknya perbankan yang menyalurkan FLPP," kata dia.

Di sisi lain, dia berharap aturan perbankan untuk rumah MBR tidak terlalu ketat sehingga pengembang bisa membangun lebih besar lagi untuk rumah MBR.

Terkait jumlah bank pelaksana KPR FLPP, Budi Hartono mengatakan, kini ditambah dari semula 40 menjadi 43 termasuk menggandeng PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Penambahan jumlah bank pelaksana itu diharapkan ikut memuluskan target penyaluran KPR FLPP tahun 2018. "Kami juga akan mengevaluasi penyaluran bank pelaksana pada September 2018," tegasnya.

Direktur Bank BTN, Iman Nugroho Soeko pernah mengatakan bahwa pihaknya juga siap menerima limpahan dari bank pelaksana lain yang belum optimal menyalurkan FLPP. Hal itu juga bertujuan untuk membantu PPDPP mencapai target yang dicanangkan.

BTN optimistis mampu mengoptimalkan FLPP dan berperan aktif mendukung sektor perumahan dalam menyalurkan pembiayaan sektor perumahan. Hal ini sejalan dengan target Bank BTN untuk mengejar angka penyaluran pembiayaan perumahan subsidi yang dipatok sekitar 600.000 unit.

Sementara itu, bagi Eman, para pengembang juga butuh kepastian aturan soal pajak guna menepis hambatan psikologis dalam membangun. Pemerintah perlu meninjau sejumlah peraturan perpajakan yang selama ini dinilai kurang ramah terhadap perkembangan industri properti. Antara lain isu penerapan PPN Final, pajak lahan terlantar, PPnBM dan jenis-jenis pajak lainnya yang sudah tidak relevan.

Contoh lain, ujar dia, PPnBM sebesar 20% untuk rumah tapak mewah seharga Rp 20 miliar dan rumah vertikal *strata-title* seharga Rp 10 miliar perunit, sebaiknya di *fee bubidey* atau dihilangkan.

Dia juga menyoroti maraknya isu penerapan pajak final non final dan penerapan pajak progresif untuk tanah terlantar beberapa waktu lalu yang cukup mengganggu psikologis pengembang. Banyak pelaku usaha properti yang sudah mau bergerak akhirnya memilih untuk menyetop dulu pembangunan. Konflisi itu berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.

"Lalu, ada isu lahu ditahan dikenai Pph, itu isu mengganggu psikologis pengembang. Bila kerangan soal pajak sudah terjawab, kami optimistis sampai akhir tahun 2018, industri properti akan meningkat," kata dia.

Judul	**Kemenhub Bangun Rumah Tahan Gempa**	Tanggal	Rabu, 29 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 22)		
Resume	Rumah bagi korban gempa di Lombok		

Kemenhub Bangun Rumah Tahan Gempa

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ikut membangun rumah bagi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rumah yang dibangun menggunakan rangka baja yang lebih tahan gempa.

"Kami bekerjasama dengan Fakultas Teknik Univ Gajahmada untuk membangun rumah-rumah. Rumah ini di design oleh teman-teman di FT UGM. Sifatnya temporer tapi bisa menjadi *growing house*," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam siaran pers di Jakarta, baru-baru ini.

Pernyataan Menhub itu dilontarkan di sela kunjungannya ke di Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Lombok Utar, baru-baru ini. Sebelum melakukan kunjungan ke Pelabuhan Bangsal, Menhub berkesempatan memberikan bantuan secara simbolis dari Komunitas Transportasi Udara kepada Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) untuk membantu masyarakat Lombok yang menjadi korban gempa berupa tenda, selimut, truk tangki, dan tangki air.

Rencananya, rumah yang dibangun Kemenhub berjumlah 50 unit yang berada dalam satu klaster dengan target penyelesaian pembangunan pada 9 September 2018.

"Satu hal yang baik menurut saya, dimana rumah itu dibangun dengan bahan-bahan yang ada disini. *Stakeholder* perhubungan bersama FT UGM akan membangun 50 rumah disini yang berupa satu klaster. Kita harapkan 9 September sudah selesai," ungkap Budi Karya.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Nizam menambahkan bahwa rumah dengan sistem huntrap ini akan dibangun menggunakan rangka baja yang lebih tahan gempa. Untuk dindingnya menggunakan material yang masih dimiliki oleh masyarakat, contohnya bambu atau papan. Untuk tahap awal, rumah ini akan dibangun dengan luas 18 meter persegi (3 x 6 m) yang kemudian nantinya akan bisa dijadikan rumah permanen yang lebih luas lagi. **(ed)**